ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.1, No.3, Februari 2022

Efektifitas Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013 Dan 2014 Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan

Tahmit Ansar
Universitas Lakidende Unaaha, Indonesia
Email : tahmitansar67@gmail.com

Article History:
Received: 28 Januari 2022
Revised: 02 Februari 2022
Accepted: 03 Februari 2022

Keywords:*Efektivitas, lmplementasi Kebijakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menjelaskan efektivitas imlementasi kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan 2014 di Dinas Sosial, Kabupaten Konawe Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan 2014 di Dinas Sosial,Kabupaten Konawe Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatiaf. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan untuk data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Tahun Anggaran 2013 sampai pertengahan 2014 kurang efektif karena sistem manajemen yang kurang baik, sarana kegiatan yang kurang memadai, jumlah pegawai yang tidak seimbang dengan kapasitas pekerjaan kautor serta faktor-faktor 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi, dan 4) struktur birokrasi. Hal tersebut membuktikan bahwa efektivitas implementasi kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 l 3 sampai pertengahan tahun 2014 sangat ditentukan oleh sistem manjemen yang baik, sarana yang memadai dan kecukupan jumlah pegawai serta faktor faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi. dan struktur birokrasi yang mendukung dan dilaksanakan dengan baik.*

PENDAHULUAN

Diberlakukannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan kekuatan baru bagi pengembangan otonomi pemerintah daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan Negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelanan masyarakat, dalam arti daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi

kebijakan-kebijakan daerah.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah sesungguhnya merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Pencapaian cita-cita tersebut dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dalam bentuk operasional penyelenggaraan pemerintahan, selaras dengan fenomena dan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Harapan besar yang masyarakat amanahkan adalah tercapainya pelayanan prima dan pengelolaan kebijakan secara konsisten, efisien, dan efektif sebagai fungsi penting pemerintahan, apabila pelayanan publik sudah dapat terselenggara secara prima di daerah, dan pengelolaan kebijakan (misalnya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan asprrasi masyarakat) juga dapat dilaksanakan secara arif, tepat, dan efektif oleh aparatur daerah, maka daya saing juga akan mengalarni peningkatan. Kunci daya saing adalah efisiensi dan mutu, baik dalam pengelolaan pelayanan, maupun dalam ketepatan dan kepastian kebijakan.

Bake (2009:93); dalam Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas Anggaran Negara, dengan sistematis menelaah beberapa fenomena penyimpangan pelaksanaan atau implementasi anggaran, salah satunya dalam proses-proses pelaksanaan tender pekerjaan proyek pemerintah atau pengadaan barang dan jasa pemerintah atau pengadaan barang dan jasa tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Kalaupun proses tender proyek dilaksanakan, itu hanya bersifat formalitas belaka, sebab telah dipesan (diorder) sebelumrrya melalui konspirasi penguasa, pengusaha dan aparat keamanan. Konsep dan pelaksanaan pengawasan dalam implementasi APBD umumnya hanya semata-mata memfokuskan perhatian pada pencapaian realisasi anggaran, disyaratkan pada kelengkapan dokumen pelaporan anggaran tahunan atau tertib administrasi saja.

Selanjutnya pada tahap implementasi APBD, permasalahan yang sering terjadi antara lain Pelaporan atau pengSPJan terlambat juga merupakan masalah yang sering terjadi pada umumnya, dimana laporan tahunan SKPD baru dapat diselesaiakn pada bulan Maret atau April, kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan yang sudah di bagi per Triwulan lewat dari jangka waktu yang sudah direncanakan sebelumnya. Fenomena tersebut, khususnya laporan keuangan tahun 2013 didapatkan pula Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan.

LANDASAN TEORI

Konsep Efektifitas

Pengertian efektivitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu aktivitas sektor publik, sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif bilamana kegiatan dimaksud mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan penyediaan layanan publik, yang tidak lain merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pengertian teorrtis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan "Efektivitas". Bagaimanapun definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum.

Pengertian efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau adapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa besar jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektifitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Devas, dkk (1989 : 279-280) menyatakan bahwa efektifitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah haruslah sedemikian rupa, sehingga memungkinkan prograrn dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Sedangkan rnenurut Miller (1997: 292)

mengemukakan bahwa :

"Efectiveness be define as the degree to wich a social system achieve its goals. Efectiveness must be distingished from efficiency. Efficiency is mainly concered with goal attainments."

Efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas ini hans dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan.

Steers (1985:206) mengemukakan lirna kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi dalam melaksanakan suatu kebijakan yaitu: produktivitas, kemampuan adaptasi fleksibilitas, kepuasan kerja, kemampuan berlaba, dan pencarian sumber daya.

Hal ini terjadi karena pendekatan keanekaragaman terhadap masalah yang merintangi usaha pengukuran yang meliputi: (1) kriteria evaluasi yang ada sering tidak mantap, (2) untuk perspektif waktu yang berbeda-beda (jangka pendek versus panjang), (3) kriteria seringkali bertentangan. satu sama lain, (4) sebagian kriteria tidak dapat diterapkan pada jenis-jenis organisasi tertentu, (5) sebagian kriteria mungkin sulit diukur dengan tepat yang penting ialah, setiap usaha untuk rnenilai tingkat efektivitas organisasi yang berlaku saar ini harus didahului oleh analisis yang teliti mengenai kemungkinan pembatasan atau bidang kesalahan, yang tidak dapat dipisahkan dari setiap usaha evaluasi. Jika dalam penilaian didapatkan kriteria evaluasi yang tidak tepat, penilaian yang dihasilkan mungkin tidak ada gunanya. Semua konsep efektivitas tersebut hanya menunjukkan pada pencapaian tujuan organisasi, sedang bagaimana cara mencapainya tidak dibahas. Argyris (1968:312) membahas bagaimana mencapai tingkat efektivitas dengan mengatakan, bahwa:

"Organizational efectiveness then is balanced organisation optimal emphasis upon achieving object solving competence and human energy utilization."

Dalam mencapai efektivitas suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berbeda-beda tergantung pada sifat dan bidang kegiatan atau usaha suatu organisasi. Sejalan dengan hal tersebut maka Komberly dan Rottman (dalam Kusuma, 2003:32) berpendapat bahwa efektivitas organisasi ditentukan oleh lingkungan, teknologi, pilihan strategi, proses dan kultur.

Konsep Dan Teori Kebijakan

Menurut Dye (Santosa, 2008:27), bahwa kebijakan publik sebagai pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak. Dalam upaya mencapai tujuan Negara, pemerintah perlu mengambil pilihan langkah tindakan yang dapat berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu apapun merupakan suatu kebijakan publik karena merupakan upaya pencapaian tujuan dan pilihan melakukan sesuatu terhadap masyarakat.

Senada dengan pandangan Dye, Edwards dan Sharkansky (Koryati, dkk., 2005:8) mengartikan kebijakan sebagai apapun yang dikatakan dan apa yang dilakukan atau apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah, yang ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dengan berbagai program dan tindakan. Lebih lanjut, Jones (Davey, 1998:170) mengungkapkan bahwa : "kebijakan adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau untuk menciptakan tujuan tertentu oleh instansi berwenang dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan, dan juga merupakan suatu usulan arah tindakan yang ditujukan untuk seseorang, kelompok, atau pemerintah guna mengatasi hambatan atau memanfaatkan kesempatan pada suatu lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan dan merealisasikan sasaran".

Easton (Krismartini, dkk., 2009 : 7) mendefinisikan kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat. Mengacu pada pendapat tersebut

maka kebijakan APBD tahun 2013 dan tahun 2014 yang telah menjadi sebuah produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), sudah seharusnya dilaksanakan secara tegas oleh pemerintah daerah kepada seluruh SKPD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan Impelementasi Kebijakan APBD Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan. Penulis memilih pendekatan kualitatif pada penelitian ini, karena pendekatan kaulitatif lebih menekankan proses dari pada hasil. Dalam penelitian ini peneliti memilih pihak yang dijadikan responden adalah yang dianggap mempunyai informasi (key-infroman) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informan kunci tersebut adalah "purpose sampling. Adapun sampel yang dipilih diantaranya Jajaran aparatur Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan, yang terdiri dari : Kadis, Sekdis, Kabid Banjamsos, Kabid Rehabilitasi, Kabid Pemberdayaan, Kasie Banjamsos, Kasie Lanjut Usia, Kasie Bencana Alam & KTK dan dua orang staf Anggota DPRD, serta informan lainnya yang terkait dengan proses implemenasi kebijakan APBD Kabupaten Konawe Selatan T.A 2013 dan 2014. Adapun Teknik Analisis Data yang dikumpulkan kemudian dideskripsikan, selanjutnya dianalisis dan pada akhirnya diinterpretasikan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersandar pada apa yang dikembangkan oleh Strauss dan Corbin (1990:26). Adapun prosedur analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut: Open Coding Pada tahap ini peneliti menganalisis data anggaran belanja daerah Kabupaten Konawe Selatan. Kegiatan ini meliputi proses pengungkapan, merinci, mernbandingkan dan mengkonseptualisasi data. Data yang dimaksud adalah data berupa isi suatu dokumen dan hasil wawancara. Axial Coding Dalam tahap ini, analisis data dan kategori-kategori yan relevan dengan fokus penelitian yang tersusun dalam open coding. Selective Coding. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap kategori inti yang berkaitan dengan berbagai kategori lain yang ditemukan. Langkah selanjutnya adalah memeriksa hubungan antar kategori dan akhirnya telah rnenghasilkan suatu kesimpulan. Dalam tahap selective coding ini, peneliti mulai menginterpretasikan hasil analisis data yang telah dilakukan terkait dengan anggaran belanja Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 dan 2014.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Implementasi Kebijakan APBD tahun 2013

Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2013 mengelola anggaran sebesar Rp. 2.843.269551, Anggaran tersebut diprioritaskan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2014 dan indikator kinerja keberhasilan pencapaiannya sebagaimana terlihat dibawah ini :

Meningkatnya pemberian pelayanan dan pembinan kepada masyarakat, indikator kinerjanya:

a. Lancamya administrasi perkantoran
b. Lancarnya pelayanan jasa komunikasi sumber daya air dan Iistrik
c. Terpenuhinya jasa administrasi keuangan
d. Terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
e. Terpenuhinya Peralatan Kantor

f. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
g. Meningkatnya kinerja apartur
h. Sinkronnya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tupoksi
i. Terpenuhinya jasa tenaga penunjang program dan kegiatan

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah menjelaskan bahwa tugas Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan adalah mengurus urusan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi. Urusan tersebut dalam internal dinas dibagi atau dilaksanakan oleh empat bidang dan satu sekretariat. Secara umum implementasi kebijakan APBD Tahun Anggaran 2013 dan 2014 dari hasil telaah dokurnen dan hasil wawancara dapat diketahui dari penjabaran pelaksanaan sekaligus pencapaian target kegiatan di sekretariat dan masing-masing bidang berikut ini :

Efektivitas Implementasi Kebijakan APBD tahun 2014

Pelakasanaan kebijakan APBD pada tahun 2014, Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan mengelola anggaran sebesar Rp.2.188.464.269. Uraian kegiatan dalam rangka rnencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2014 dan indikator evektifitas pencapaiannya. Sejak pertengahan tahun 2014 Dinas Sosial sudah mulai ada perubahan dalam struktur manajerial kantor. Walaupun tidak serentak terlaksana, tetapi kebijakan pimpinan baru mulai melakukan penataan birokrasi kearah yang lebih baik, semakin ditertibkan pengadministrasian, dan transparansinya kegiatan semakin diwujudkan.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kasie. Banjamsos sesuai dengan hasil wawancara, bahwa:

> " Mulai pertengahan tahun 2014 ini, kegiatan yang selama ini belum berjalan sesuai dengan mekanisme seperti perjalanan dinas, dengan adanya kebijakan baru sudah diatur sedemikian rupa sehingga proporsional pelaksanaan kegiatan yang ada (wawancara 25 Mei 2015).

Jika mencermati hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa dari dua belas kegiatan tersebut di atas pada dasarnya terlaksana sesuai dengan mekanisme yang ada, walaupun masih ada kegiatan yang pelaksanaannya kurang efektif, yakni tunjangan honorer yang masih tertunda pembayarannya.. Meningkatnya pendapatan daerah serta perbaikan penataan dan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien, mencapai target 100 %. Jumlah 3 dokumen yang menjadi target berhasil dilaksanakan, Target dari tujuan diatas adalah terlaksananya Penyusunan RKA, RENJA dan LAKIP. Masalah pada kegiatan ini masih sama dengan tahun sebelumnya yakni pegawai yang diserahi tugas untuk mengerjakan hal tersebut bukanlah pegawai yang mempunyai Tupoksi tersebut. Kondisi ini tidak bisa juga disalahkan dikarenakan kemampuan administratif pegawai yang rnenduduki jabatan Kasubag Perencanaan Program memang kurang mampu mengerjakan tugas tersebut. Sesuai dengan wawancara dengan Sekretaris dinas berikut ini :

> " Dalam pantauan kami selama ini pekerjaan yang kami berikan kepada Kasubag perencaan program, selama ini biasanya pekerjaan yang dia lakukan selalu agak terlambat dari waktu yang direncanakan, menurut saya mungkin dia kurang pemahamannya atas pekerjaan yang dilakukan makanya pimpinan baru untuk sementara mengalihkan tugas itu kepada orang lain "... (wawancara 27 Mei 2015).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terhambatnya program dimaksud khususnya sampai pertengahan tahun 2014 karena terbatasnya kemampuan adminstratif pegawai yang menanganinya, hat ini dapat merupakan salah satu kendala dalam Implementasi APBD di Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi KebijakanAPBD tahun 2013 dan 2014 pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan

Berdasarkan hasil penelitian efektivitas implementasi kebijakan APBD Tahun Anggaran 2013 dan 2014 dipengaruhi oleh faktor-faktor:

1. Komunikasi; implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan, dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana,
2. Sumber daya; akan menjadi masalah bagaimanapun jelas dan konsistennya implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim, jika personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program kekurangan sumber daya dalam melaksanakan tugasnya,
3. Disposisi atau sikap; salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementator. Jika implementator setuju dari kebijakan, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada 3 bentuk sikap atau respon implementator terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk atau arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut,
4. Struktur birokrasi; adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka dalam menjalankan kebijakan.

a. Komunikasi

Implementasi suatu kebijakan akan berjalan dengan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan suatu kebijakan dapat dipahami oleh individu-individu atau pegawai dalam suatu institusi yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan, dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dan menyeluruh dengan para pelaksana. Sehubungan dengan penelitian ini komunikasi-komunikasi dalam hal ini diartikan secara luas, antara lain bisa dalam pertemuan/rapat rutin dalam kantor, hubungan kerja sama antar pegawai/staf dengan atasan maupun antara staf dalam satu unit kerja dengan tujuan untuk merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Sementara hasil penelitian menunjukkan bahwa, komunikasi yang dibangun pada kurun waktu tahun 2013 sampai pertengahan 2014 di Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan kurang terlaksana dengan baik. Banyak diantara pegawai yang tidak memahami atau menolak dan bahkan tidak dilibatkan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBD, sehingga pelaksanaan setiap kegiatan banyak yang mengalami kendala. Hal ini merupaka salah satu penyebab kurang efektifnya implementasi kebijakan APBD di Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan pada kurun waktu tersebut.

Fenomena seperti ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan kepala seksi Benacana Alam & KTK Sosial yang mengatakan bahwa :

"Keadaan dinas kami pada tahun 2013 sampai pertengahan tahun 2014, pelaksanaan program kurang terarah/teratur. Keterlibatan pegawai pada suatu kegiatan tidak berdasarkan atas Tupoksi, sehingga pemahaman pegawai akan suatu program sangat kurang dan keterlibatan pegawai saat itu kurang merata. Banyak pegawai yang masuk keluar kantor tidak menentu" (kutipan wawancara, 7 Mei 2015).

Kondisi tersebut menyebabkan implementasi kebijakan APBD di Dinas Sosial pada saat itu kurang efektif, berdampak pada penyelenggaraan program yang kadang berjalan kurang normal karena yang melaksanakannya bukan bidang tugasnya, hubungan antara pegawai kurang harmonis,

rasa tanggung jawab dalam melaksanakan program sangat kurang.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan didukung oleh pendapat Edward III (2011 : 1-2), penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor komunikasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan APBD T.A 2013 dan 2014 pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan, baik itu yang komunikasi yang bersifat internal maupun komunikasi yang bersifat ekstemal atau tepatnya dikatakan koordinasi.

b. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan suatu program / kegiatan dalam setiap unit kerja, faktor sumber daya merupaka salah satu faktor yang sangat penting dan .berpengaruh dalam implementasi kebijakan sehingga suatu program yang dilaksanakan dapat lebih efektif dalam pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sumber daya yang dimaksud antara lain adalah sumber daya manusia/staf dan sarana pendukung.

Sumber daya manusia atau staf (implementator) pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan tahun 2013 dan 2014 sesuai dengan hasil penelusuran dokumen yang ada, khususnya dari segi kualitas dengan dukungan kualifikasi pendidikan pegawai dapat dikatakan sudah cukup memadai walaupun jumlahnya belum seimbang dengan beban kerja Dinas.

Dari data tentang pendidikan formal pegawai Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan, khususnya pegawai yang menduduki jabatan struktural dari 13 orang pegawai, 13 orang atau 100 % sudah memiliki kualifikasi pendidikan Sl. Hal ini berarti bahwa dari segi kualitas para implementator tidak menjadi faktor penghambat pelaksanaan suatu kegiatan.

Sesuai hasil wawancara tersebut, sehubungan dengan tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh pegawai Dinas Sosian Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana yang ditunjukkan pada table 4 sebenarnya sudah memadai, namun dari segi jumlah pegawai masih belum seimbang dengan beban tugas yang diemban oleh Dinas. Kondisi ini, khususnya pada kurun waktu tahun 2013 sampai pertengahan tahun 2014 dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan APBD.

Pendidikan formal tidak sepenuhnya menentukan kualitas pegawai. Pendidikan dan pelatihan selama menjalankan tugas (in-jobtraining) temyata cukup mampu untuk meningkatkan mutu pegawai. Selama dua tahun terakhir ini sesuai hasil penelitian, semua pegawai Dinas Sosial telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan bidang kesekretariatan, Sosial. Hal ini bisa dianggap mampu untuk mengembangakn SDM pegawai Dinas dalam melaksanakan setiap program yang ada, terutama menjelang akhir tahun 2014.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa peranan sentral manajer dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan kebijakan APBD, bersifat sentralistik dan kurang memperhatikan mekanisme yang ada. sehingga komitmen para pegawai sangat kurang. Hal tersebut dapat mempengaruhi efektivitasnya pelaksanaan APBD.

Berdasarkan basil wawancara di atas dengan didukung oleh teori Edward III (2011: 1-2), dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan APBD di Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan pada Tahun Anggaran 2013 dan 2014 salah satunya dipengaruhi oleh faktor disposisi atau sikap para implementator yang kurang menerima atau menolak kebijakan APBD, sehingga menimbulkan kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan APBD tersebut.

c. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun

nyata dengan apa yang mereka lakukan dalam menjalankan kebijakan.

Struktur merupakan susunan formal dan mekanisme dimana organisasi dikelola sebagai perwujudan hubungan-hubungan antar komponen-komponen, bagian-bagian fungsi-fungsi kegiatan-kegiatan dari posisi yang menunjukkan tingkat spesialisasi kegiatan kerja. Ada 5 aspek utama struktur birokrasi/organisasi sebagai berikut:

1. Pembagian; kerja menunjukkan tanggungjawab atau satuan organisasi untuk bidang tertentu dari beban kerja organisasi.
2. Pimpinan dan bawahan Garis : menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang menghubungkan atasan dan bawahan dalam keseluruhan organisasi. Aliran ini dimulai dari jenjang organisasi yang tertinggi sampai karyawan terendah dalam suatu organisasi mempunyai suatu kaitan dengan pimpinan puncak organisasi. Dalam hal ini prinsip garis komando harus jelas, dimana seorang bawahan menerima tugas dan pelimpahan wewenang dari pimpinannya dan melaporkan pertanggungjawaban kepada pimpinannya.
3. Jenis pekerjaan yang dilaksanakan: Label atau deskripsi pada setiap kotak menunjukkan pekerjaan atau tugas-tugas pekerjaan dan tanggungjawab yang berbeda.
4. Pengelompokkan bagian-bagian kerja Keseluruhan bagan orgamsasi menunjukkan dasar pembagian kegiatan organisasi, misalnya atas dasar - fungsional atau divisional atau lainnya (departementalisasi).
5. Tingkat manajemen: Sebuah bagan tidak hanya menunjukkan pimpinan dan bawahan, tetapi juga hirarki manajemen secara keseluruhan.

Struktur Organisasi secara umum seyogyanya berfungsi sebagaimana yang diuraikan di atas, namun pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan, khususnya pada tahun 2013 sampai pertengahan tahun 2014 tidak berfungsi sebagaimana yang diuraikan tersebut. Struktur organisasi pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan bukan merupakan wadah penyusunan dan pengaturan orang-orang untuk dapat menciptakan instansi yang meliputi faktor-faktor seperti jumlah spesialisasi pekerjaan, serta cakupan perumusan antar pribadi guna pencapaian tujuan yang efisien dan efektif. Pada struktur organisasi di Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan diadakan sepertinya bukan sebagai wadah bekerjanya para pegawai, pembagian peranan-peranan di dalam unit kerjanya, pola-pola wewenang dan sistem komunikasi, komitmen dari orang-orang pada doktrin dan program dari instansi tersebut.

KESIMPULAN

Pada bagian atau bab penutup ini akan disajikan kesirnpulan dari keseluruhan hasil analisis dan pernbahasan yang telah dilakukan, yang disinkronkan dengan tujuan penelitian ini untuk rnernperoleh garnbaran yang jelas dan tuntas nengenai tingkat efektivitas, dan kernudian rnengetahui lebih dalam faktor-faktor yang rnernpengaruhi efektivitas irnplernentasi kebijakan APBD pada dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2013 dan 2014. Berdasarkan hasil analisis dan pernbahasan yang telah dikernukakan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut bahwa Efektivitas implementasi kebijakan APBD TA. 2013 dan 2014 pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan adalah Walaupun dari laporan keuangan T.A. 2013 anggaran dari semua bidang pada umumnya terpakai, namun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan didapatkan bahwa implernentasi kebijakan APBD belum efektif dan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, disamping anggaran dari semua bidang urnumnya terealisasi juga

didapatkan bahwa irnplementasi kebijakan APBD sudah efektif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan APBD TA 2013 dan 2014 di Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan yaitu komunikasi dan sumberdaya.

DAFTAR REFERENSI

Anthony, Robert N; dan Young, David W, 1999, Manajement Control in Nonprofit Organizations, sixth edition, The McGraw-HiH Companies, United of America.

Bake, Jamal. (2009). Parttsipasi Transparansi Akuntabilitas Anggaran Negara.Rekonstruksi Paradigma Pengelolaan Anggaran Negara Menuju Good Governance, Citra, Jakarta..

Davey, K.J. (1998). Pembiayaan pemerintah daerah. Jakarta: U.I. Press.

Devas Nick, dkk., 1989, Keuangan Pemeriniah Daerah Di Indonesia, Ul-Press, Jakarta.

Dunn, William. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gajah mada University Press, Yogyakarta.

Edward III, George, (2011). Model Implementasi Kebijakan. http//rhizalanventure, wordpre ss.com/2011102/06.

Ermaya, (1994). Teori dan praktek kebtjaksanaan negara. Bandung'. Ramadhan.

Erwan, Kusuma, Robert. (2003). Efeksivuas Organisasi Dispenda Kabupaten Merauke Provinsi Irian Jaya, Tesis Gadjah Mada, Y ogyakarta.

Ishi, Hitotsubashi, 1996, Budgets And Budgetary Proces in Japan, Journal of Economics, Juni, Vol. 37, 1-13.

J.Moleong. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Jones, B.M. (1995). Local Government Financial Management. Hertfordshire: ICSA Publishing.

Koryati, dkk. (2005). Kebijakan dan manajemen pembangunan wilayah. Yogyakarta. Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia. Krismartini, dkk. (2009). Analisis kebijakan publik. Jakarta: Universitas Terbuka. Kunarjo, 19%, Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan, Edisi ketiga, UI~Press, Jakarta.

Lernbaga Administrasi Negara (2003). Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Mardiasmo, 2001, Budgetary Slack, Resulted from the Effects of Local Government Financial Dependency on Central and Provincial Government in Planning and Preparing Local Government Budget _· The Case of Indonesia, Journal of Accounting, Management, Economics Research, Vol. 1, 55 - 74. Modul Pelatihan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, FE UGM.

Handayaningrat. (1996:16). Didownload dari "Definisi/Pengertian Efektivitas" Posted on 28 Maret 2009 by Danfar.

Halim, R. (2005). Analisis kemampuan pemerintah kota dalam peiaksanaan otonomi daerah di Palu Propinsi Sulawesi Tengah. Tesis Universitas Hasanuddin, Makassar.

Hatta, M. (2005). Implementasi kebijakanpemerintah daerah dalampengelolaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Gowa. Tesis Universitas Hasanuddin. Makassar

Kurniasih, Wiwin. (2007). Analisis Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Dinos Kesehatan Yang Bersumber Dari APED. Tesis Universitas Diponegoro. Semarang.

Munir, Badrul, 2003. Perencanaan Anggaran Kinerja Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah, Samawa Center, Mataram

Santosa, P. (2008). Administrasi publik : Teori dan aplikasi good governance. Bandung: Refika Aditama.

Sinambela, L.P. (2008). Reformasi pelayanan publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Sharma, R.A.1982. Organizational Theory and Behaviour, New Delhi.Tata MC.Graw Hill publishing company Limited.

Steers Richard. M .. 1985. Efektivitas Organisasi. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga

Strauss and Corbin. 1990. Basic Of Qualitative Reserch. Sage Publication.. London.

Supendi. (2007). Analisis Pengaruh Efisiensi dan Efektivitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Kinerja Pemeriruab Kabupaten Tanggamus, didownload dan.hrtp/rdigilip.unilaac. id/go.php?id=laptunilapp-gdl-s2-2007-supendi-637.

Wahab, Solochin, Abdul, 1997, Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.

Wibawa, S, Yuyurr Purbokusumo dan Agus Prarrnrsinto, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Winarno, B. (2007). Kebijakan publik : teori dan proses. Edisi revisi. Y ogyakarta: Media Pressindo.

World Bank, 1998, Public Expenditure Management Handbook, The World Ba11k,

Washington DC..Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.